



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : B.234 / 28 / 08 / 2024**

TENTANG

**PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS 2024-2029**

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal BAB II Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 25 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten Tanggamus, perlu ditetapkan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

8. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN?1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga;
3. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 25 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tanggamus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHANA BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS.
- KESATU : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebaagimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib mengacu pada Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KETIGA : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan untuk:
- Jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; dan
 - Kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJ.
- KEEMPAT : Perubahan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dilaksanakan dengan memperhatikan:
- Perkembangan keadaan;
 - Kebutuhan Daerah;
 - Perubahan RPJMD; dan/atau
 - Ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada Tanggal 28 JUNI 2024



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : B.234 / 28 / 08 / 2024

TANGGAL : 28 Juni 2024

TENTANG **PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024-
2029**

**PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS 2024-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Peta rencana merupakan penjabaran dari proses perencanaan penyelenggaraan SPBE pada Pemerintahan Daerah melalui serangkaian program dan/atau kegiatan yang dilakukan beserta indikator pencapaian target dan penanggung jawab target tersebut sehingga penyelenggaraan SPBE menjadi terarah dan terpadu. Penggunaan TIK di lingkungan pemerintah daerah sudah merupakan keniscayaan. Disebutkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perpres ini menjadi payung hukum yang kuat tentang adanya Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis elektronik. Inti dari Perpres ini adalah kematangan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pemerintahan hingga level integrasi. Dimana integrasi mulai dari antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga antar pemerintah daerah dan ke pemerintah pusat. Peran teknologi informasi saat ini sudah termasuk sebagai motor penggerak dalam proses pembangunan daerah, sehingga diperlukan Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selaras dengan Perencanaan Pembangunan, sehingga peran TIK akan sangat optimal dalam ikut serta menjalankan laju pembangunan daerah.

Peta rencana SPBE ini disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah, dan Peta Rencana SPBE Nasional. Dalam pelaksanaan peta rencana ini perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Tanggamus diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi Kabupaten Tanggamus dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan SPBE sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, memberikan solusi dalam pengintegrasian sistem sehingga duplikasi kerja, duplikasi data, dan ketidaktepatan data dapat dihindari dalam implementasi teknologi informasi kedepannya.

1.2. Dasar Hukum

Berikut ini adalah dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan dokumen peta rencana SPBE Kabupaten Tanggamus, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
7. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
10. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
11. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia;

17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
18. Peraturan Presiden no. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
19. Peraturan Menteri PANRB no.8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE
20. Peraturan Menteri PANRB no.19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
21. Peraturan Menteri PANRB no.5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Tanggamus memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan, dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk :

1. Kerangka Pemikiran Dasar (SPBE Framework);
2. Solusi Pentahapan Pengembangan (SPBE Roadmap);
3. Rencana proyek implementasi 5 tahun (SPBE Implementation plan);

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Peta Rencana SPBE Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya arah kebijakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tanggamus yang sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Tanggamus;
2. Tersedianya acuan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi, informasi dan komunikasi;
3. Tersedianya acuan dalam pengembangan infrastruktur TIK Kabupaten Tanggamus
4. Tersedianya acuan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak yang mendukung layanan SPBE;
5. Tersedianya acuan dalam standar pengamanan layanan SPBE

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1. Bab 2: VISI MISI DAN SASARAN SPBE

Bab ini menjelaskan Visi, misi, dan sasaran SPBE serta arah kebijakan dan strategi SPBE.

1.4.2. Bab 3: KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN TANGGAMUS

Bab ini menggambarkan kondisi aktual penerapan SPBE dan kondisi aktual tata kelola TIK, serta visi misi dan sasaran strategis RPJMD tahun 2024-2029 Kabupaten Tanggamus

1.4.3. Bab 4: TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN TANGGAMUS

Bab ini memberikan penjelasan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 – 2029, serta target kualitatif penerapan SPBE Kabupaten Tanggamus.

1.4.6. Bab 5: ANALISIS KESENJANGAN

Bab ini memberikan analisis kesenjangan dari setiap domain dan aspek SPBE berdasarkan kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Tanggamus

1.4.7. Bab 6: PETA RENCANA SPBE KABUPATEN TANGGAMUS

Bab ini berisi peta rencana SPBE Kabupaten Tanggamus selama 5 tahun ke depan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029.

1.4.5. Bab 7: DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI

Bab ini memberikan detail tahapan Implementasi SPBE yang terdiri dari inisiatif- inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

1.4.6. Bab 8: PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan perencanaan pengembangan SPBE Kabupaten Tanggamus selama 5 (lima) tahun diselaraskan dengan rencana strategis SPBE yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB II **VISI MISI DAN SASARAN SPBE**

2.1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tanggamus

Salah satu evaluasi penerapan e-Government di pemerintahan daerah adalah belum terwujudnya sistem yang saling terintegrasi. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan transformasi dari era e-Government menuju i-Government (integrated Government). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi.

SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2.1.1. Visi SPBE

Visi SPBE menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Visi SPBE Kabupaten Tanggamus selaras dengan Visi SPBE Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu: “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.”

2.1.2. Misi SPBE

Misi SPBE merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi SPBE. Misi SPBE Kabupaten Tanggamus dirumuskan sebagai berikut:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal;
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

2.1.3. Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE Kabupaten Tanggamus adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

2.1.4. Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE Kabupaten Tanggamus adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

2.1.5 Arah Kebijakan dan Strategi SPBE

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

A. Tata Kelola SPBE

1) Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Pemerintah Daerah.

- a) Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.
- b) Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut.
 - 1) Melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di Pemerintah Daerah.
 - 2) Membangun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
 - 3) Melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar Pemerintah Daerah.

2) Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu

- a) Pemerintah Daerah dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.

- b) Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah sebagai berikut.
 - 1) Meningkatkan koordinasi antar Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE.
 - 2) Melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Nasional, dan kepala daerah.
 - 3) Melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.

B. Layanan SPBE

- 1) Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat.
 - a) Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penrusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
 - b) Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut.
 - 1) Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi.
 - 2) Membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
- 2) Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan.
 - a) Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
 - b) Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah sebagai berikut.
 - 1) Melakukan integrasi layanan di dalam dan antar Pemerintah Daerah.
 - 2) Menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- 1) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - a) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

b) Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dengan cara berikut.

- 1) Mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak nonpemerintah.
- 2) Terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar Pemerintah Daerah.
- 3) Terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE.
- 4) Menjangkau semua OPD.

c) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan moratorium pembangunan pusat data oleh Pemerintah Daerah dan mengarahkan penggunaan Pusat Data nasional.

d) Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau seluruh OPD adalah sebagai berikut.

(1) Memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal.

(2) Memanfaatkan jaringan wide band/pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.

2) Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai.

a) Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.

b) Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi cloud computing/komputasi awan.

3) Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas.

a) Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

b) Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.

c) Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah sebagai berikut.

(1) Menerapkan manajemen data yang terpadu.

(2) Menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu.

(3) Menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

D. Sumber Daya Manusia SPBE

1) Pengembangan kepemimpinan SPBE di Pemerintah Daerah.

a) Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di Pemerintah Daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.

b) Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan penerapan best practice SPBE bagi pimpinan di Pemerintah Daerah.
- 2) Membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.
- 3) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

a) Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan

remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna.

b) Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah sebagai berikut.

- 1) Mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE.
- 2) Membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

2.2 Evaluasi dan Penilaian SPBE

SPBE memiliki 3 (tiga) unsur penting dalam penerapannya, yaitu: penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, dan seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi

secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- 1) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- 2) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- 3) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Domain dan Aspek Penilaian SPBE

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Total Bobot Indikator	
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 - Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 – Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

Nilai indeks SPBE yang diberikan untuk masing-masing indikator di dalam domain dan aspek penilaian adalah angka dari 0 – 5. Kategori dari nilai indeks SPBE tersebut dapat dilihat dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kategori Nilai Indeks SPBE

NO	Nilai Indeks	Kategori
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik

3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Nilai Indeks SPBE untuk setiap domain penilaian SPBE memiliki karakteristik yang berbeda dalam penilaiannya. Karakteristik penilaian untuk domain Tata Kelola dan Kebijakan SPBE dapat dilihat di tabel 3 berikut.

Tabel 3. Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Tata Kelola dan Kebijakan

Tingkat (Level)	Karakteristik
1 – Rintisan	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi
	Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep
2 – Terkelola	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi
	Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral
3 – Terstandarisasi	Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait
	Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola
4 – Terintegrasi dan Terukur	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif
	Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola
5 – Optimum	Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara

	berkesinambungan
	Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan

Karakteristik penilaian Indeks SPBE untuk domain Layanan SPBE, dapat dilihat di tabel 4 berikut.

Tabel 4. Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Layanan SPBE

Tingkat (Level)	Kriteria
1 – Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah
2 – Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah
3 – Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan
4 – Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain
5 – Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal

BAB III KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN TANGGAMUS

3.1 Hasil Evaluasi SPBE 2022

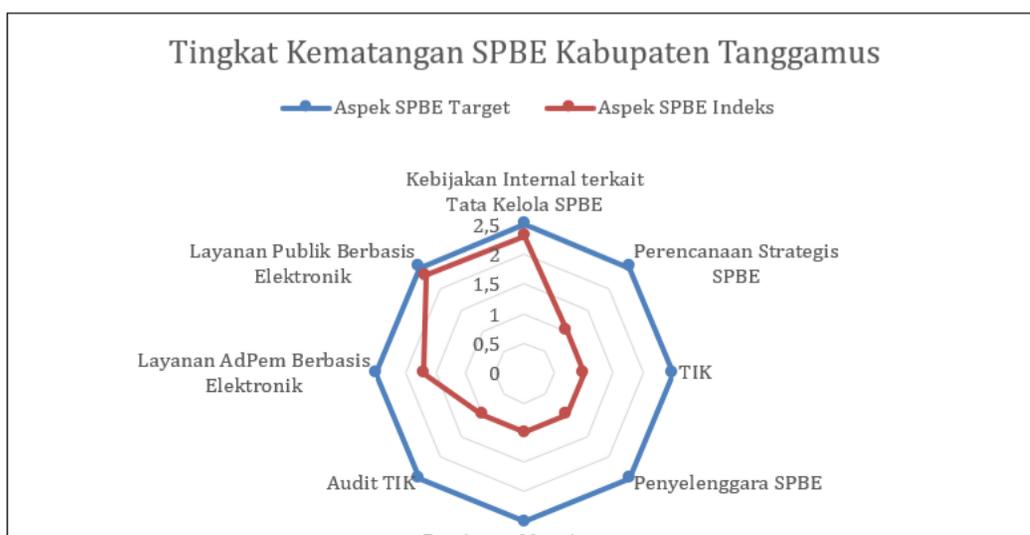
Kementerian PANRB pada tahun 2022 telah melakukan penilaian terkait Indeks SPBE Kabupaten Tanggamus yang meliputi 4 domain SPBE yaitu domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, dan Manajemen SPBE dengan nilai indeks SPBE sebesar 1,6. Detail hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Tanggamus tahun 2022 ditunjukkan oleh tabel 5.

Tabel 5. Hasil Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

Nama Indeks	Nilai 2022
SPBE	1,6
Domain Kebijakan SPBE	2,30
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,30
Domain Tata Kelola SPBE	1,00
Perencanaan Strategis SPBE	1,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1,00
Penyelenggara SPBE	1,00
Domain Manajemen SPBE	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	1,95
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,70
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,33

Analisis ini dilandaskan pada ketersediaan dan kesiapan komponen-komponen SPBE untuk memutuskan arahan dan tujuan dari penyiapan SPBE di masa yang akan datang. Evaluasi tingkat kematangan SPBE dapat dilakukan dengan mengacu ke pedoman evaluasi penyelenggaraan SPBE instansi pemerintah.

Berdasarkan rata-rata tiap kematangan setiap domain di atas, maka dibentuklah kurva jejaring seperti Gambar 1. berikut ini.



Gambar 1. Tingkat Kematangan SPBE

Selanjutnya, berikut ini adalah tabel perolehan nilai tingkat kematangan indikator. Masing-masing indikator memiliki target nilai tingkat kematangan sebesar 3 (tiga) dengan nilai maksimal yang dapat diperoleh adalah 5 (lima).

Tabel 6. Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2021	Nilai Tingkat Kematangan 2022
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	1	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	1	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1	1
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	1	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem	1	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan	1	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	1	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1	1

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2021	Nilai Tingkat Kematangan 2022
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	1	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	1	1
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	1	1
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	1	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1	3
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	1	2
37	Tingkat Kematangan Layanan	1	1

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2021	Nilai Tingkat Kematangan 2022
	Kearsipan Dinamis		
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara /	1	1
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1	1
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1	1
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	1	2
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	1	1
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1	1
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	1	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	1	2
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	1	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	1	2

3.2 Kondisi Aktual SPBE Kabupaten Tanggamus

Kondisi kesiapan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dipetakan dalam 20 program strategis seperti yang ditunjukkan tabel 6.

Tabel 7. Kondisi Implementasi SPBE

No	Program Strategis SPBE	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Membuat dan menetapkan Kebijakan SPBE (Perbup/ SK/SE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang SPBE 2. Perbup nomor tentang Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Tanggamus 3. Perbup tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesias Tingkat Daerah 4. Perbup Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penerapan Sertifikat Elektronik dalam SPBE 5. Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana SPBE Kabupaten Tanggamus 	

2	Membuat SOP yang merupakan turunan dari Kebijakan	SOP Jaringan	
3	Membuat Peta Rencana SPBE	Belum ada	
4	Membuat Arsitektur SPBE	Belum ada	

No	Program Strategis SPBE	Kondisi Aktual	Keterangan
5	Membentuk Tim Koordinasi (Pengawas dan Pelaksana) SPBE dengan Tupoksi nya	Keputusan Bupati nomor 060/14 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana SPBE Kabupaten Tanggamus	
6	Melakukan Evaluasi Berkala SPBE (update indeks SPBE)		
7	Melakukan optimalisasi Pusat Data	Pusat Data berlokasi di Dinas Komunikasi dan Informatika	
8	Membangun Jaringan Intranet	Jaringan intranet telah terhubung ke seluruh OPD	
9	Membangun Sistem Penghubung	Belum	
10	Integrasi Layanan Elektronik (Perencanaan & Anggaran, Pengarsipan, Pengaduan Publik, Kepegawaian)	Integrasi Layanan elektronik : -Perencanaan, penganggaran, penatalaksana keuangan telah terintegrasi -Layanan kepegawaian terintegrasi dengan layanan kinerja pegawai	

11	Membangun Portal Data	Belum ada	
12	Membentuk Sistem Keamanan Informasi (Indeks KAMI) / SNI 27001	Belum ada	

No	Program Strategis SPBE	Kondisi Aktual	Keterangan
13	Teknologi Kecerdasan Buatan / Datawarehouse dengan Data Analytic untuk mengambil keputusan	Belum ada	
14	Membentuk Kapasitas ASN dalam Digital Skill dan Digital Leadership	Melalui peningkatan SDM TIK secara terencana dan rutin setiap tahun	
15	Membentuk Forum Kolaborasi SPBE(Antar OPD /Antar Kabupaten)	Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana SPBE Kabupaten Tanggamus	
16	Membentuk SDM TIK	Melalui peningkatan SD TIK secara terencana dan rutin setiap tahun	
17	Membangun Portal Pelayanan Publik	https:// Tanggamuskab.go.id/	
18	Membangun Portal Administrasi Pemerintahan	https:// Tanggamuskab.go.id/	
19	Melakukan survey pengguna berkala (tingkat kepuasan dan koreksi)	Secara rutin dilakukan survey Indek Kepuasan Masyarakat	
20	Membuat Call Center	Belum ada	

	Layanan		
--	---------	--	--

3.2.1 Kondisi Aplikasi dan Website

Di setiap OPD mempunyai website yang bisa menjadi media informasi tiap-tiap OPD dan aplikasi internal administrasi pemerintahan yang ada di Kabupaten Tanggamus seperti ditunjukkan tabel 8.

Tabel 8. Daftar Layanan Aplikasi SPBE

Deskripsi Layanan SPBE	Nama Perangkat Daerah	Nama Aplikasi
Kegiatan pelayanan dalam bidang pendidikan	Dinas Pendidikan	Dapodik
Kegiatan pelayanan dalam bidang kesehatan	Dinas Kesehatan	SISMAL (Pelaporan Malaria), SITB (Pelaporan TB), Erenggar, OMSPAN, Krisna
	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung	Aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan
Kegiatan pelayanan dalam bidang pekerjaan termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Website profil Sistem • Informasi Jalan dan Jembatan
Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan perumahan rakyat termasuk kawasan permukiman.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Website profil Sistem • Informasi Jalan dan Jembatan
Kegiatan pelayanan dalam bidang ketentraman maupun ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Website Profil dalam bentuk blogspot

Deskripsi Layanan SPBE	Nama Perangkat Daerah	Nama Aplikasi
Kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan masyarakat.	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi kesejahteraan sosial • Edabu BPJK Kesehatan
Kegiatan pelayanan dalam bidang kesiapan angkatan kerja dan serapan tenaga kerja.	Dinas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Website profil • Layanan pendaftaran kartu kuning • Layanan pendaftaran transmigrasi • Layanan Pengaduan online • Layanan informasi Lowongan kerja
Kegiatan pelayanan dalam bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan hingga perlindungan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi Keluarga (SIGA BKKBN) • Aplikasi Morena BKKBN • Aplikasi Elsimil BKKBN • Aplikasi Kampung KB
Kegiatan pelayanan dalam bidang ketersediaan, kedaulatan dan pemandirian pangan daerah.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultural	<ul style="list-style-type: none"> • Simluhtan Kementerian Pertanian • E-RDKK Kementerian Pertanian • E-KPB • SIPDPS Kementerian Pertanian
Kegiatan pelayanan dalam bidang pencegahan	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Website profile • Sipesta Ratu

Deskripsi Layanan SPBE	Nama Perangkat Daerah	Nama Aplikasi
kerusakan lingkungan dan kualitas sumber daya alam		Tanggamus • Sipesta Senja Tanggamus
Kegiatan pelayanan dalam penatagunaan tanah hingga pengelolaan tanah milik aset daerah.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
Kegiatan pelayanan publik dan ketersedianya pangkalan data dalam bidang kependudukan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	• Aplikasi SIAK Kemendagri
Kegiatan pelayanan dalam pembinaan sumber daya manusia dan tata kelola pemerintah desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • SIKEUDES • SIPADES Kemendagri • Prodeskel Kemendagri • EPDESSEL Kemendagri • EHDW Kemenkes
Kegiatan pelayanan dalam pengendalian pertembuhan penduduk hingga pembinaan keluarga berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi Keluarga (SIGA BKKBN) • Aplikasi Morena BKKBN • Aplikasi Elsimil BKKBN • Aplikasi Kampung KB
Kegiatan pelayanan dalam bidang transportasi, lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan	• Aplikasi SIM pengujian kendaraan bermotor
Kegiatan pelayanan informasi publik dalam bidang persandian, komunikasi publik maupun ketersediaan prasarana dan sarana TIK.	Dinas Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi TTE • Aplikasi Manajemen Server
Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan	• Belum ada

Deskripsi Layanan SPBE	Nama Perangkat Daerah	Nama Aplikasi
koperasi, UMKM, maupun ketersedianya komoditas bahan pokok harian.	Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Kegiatan pelayanan untuk menunjang iklim penanaman modal dan pengelolaan izin usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> • OSS • Sicantik • SIMBG PUPR • Ratu Sikop Tanggamus
Kegiatan pelayanan dalam bidang pengembangan daya saing kepemudaan dan bidang olah raga	Dinas Pemuda dan Olah raga	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada
Kegiatan pelayanan dalam bidang ketersediaan data dan terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi TTE • Aplikasi Manajemen Server
Kegiatan pelayanan dalam bidang keamanan fasilitas sarana digital	Dinas Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi TTE • Aplikasi Manajemen Server
Kegiatan pelayanan dalam bidang kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
Kegiatan pelayanan dalam bidang bahan baca maupun dapat meningkatkan minat baca masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
Kegiatan pelayanan dalam bidang sirkulasi dan penyimpanan administrasi daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawasan terhadap industri pengolahannya hingga mendorong pemasaran hasil perikanan	Dinas Perikanan	

Deskripsi Layanan SPBE	Nama Perangkat Daerah	Nama Aplikasi
Kegiatan pelayanan untuk meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata hingga pengembangan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Website Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Aplikasi Point of Interest (POI) Pariwisata Tanggamus
Kegiatan pelayanan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, pengembangan sarana dan prasarana pertanian hingga pencegahan penanggulangan bencana pertanian.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultural	<ul style="list-style-type: none"> • Simluhtan Kementerian Pertanian • E-RDKK Kementerian Pertanian • E-KPB • SIPDPS Kementerian Pertanian
	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi ISIKHNAS • Aplikasi IDENTIK Kementerian Pertanian • SIPASBUN Kementrian Pertanian
Kegiatan pelayanan dalam bidang menjaga kualitas dan pengawasan penggunaan lahan hutan.	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Website profile • Sipesta Ratu Tanggamus • Sipesta Senja Tanggamus
Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan dan pengawasan industri sumber daya mineral	Dinas Tenaga Kerja	
Kegiatan pelayanan dalam bidang ketersediaan kebutuhan barang pokok maupun pengawasan harga komoditas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Kegiatan pelayanan dalam bidang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan	

Deskripsi Layanan SPBE	Nama Perangkat Daerah	Nama Aplikasi
pengawasan persaingan perindustrian	Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan masyarakat transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Website profil • Layanan pendaftaran kartu kuning • Layanan pendaftaran transmigrasi • Layanan Pengaduan online • Layanan informasi Lowongan kerja
Kegiatan pendukung tata kelola dan administrasi pemerintahan daerah	Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Website profil Kabupaten Tanggamus
Kegiatan pendukung dalam bidang administrasi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Website profil DPRD Kabupaten Tanggamus • JDIH
Kegiatan penunjang dalam perencanaan pembagunan berdasarkan data hasil penelitian	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Pelaporan Realisasi DAK Kabupaten Tanggamus • SAPAHAM (Sistem Aplikasi Pelaporan Aksi HAM)
Kegiatan penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah	Badan Pengelola Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • SIPDARI Kemendagri • Sikopda Dashboard Monitoring Tapping Box
Kegiatan penunjang peningkatan kualitas dan karir pegawai pemerintah daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
	Sekretariat Dewan	

Deskripsi Layanan SPBE	Nama Perangkat Daerah	Nama Aplikasi
	Pengurus Korps Pegawai RI	
Kegiatan penunjang bidang penelitian dan penyusunan pembangunan daerah.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Pelaporan Realisasi DAK Kabupaten Tanggamus • SAPAHAM (Sistem Aplikasi Pelaporan Aksi HAM)
Kegiatan pengawasan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> • Website Profil • E-Puspamas Tanggamus • SIPTL BPK
Kegiatan pengawasan terhadap ideologi pancasila, karakter kebangsaan hingga pengembangan etika serta budaya politik melalui pendidikan politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

BAB IV

TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN TANGGAMUS

4.1 Target Indeks SPBE

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Dinas Kominfo) Kabupaten Tanggamus berperan sebagai IT nya Kabupaten Tanggamus. Peran yang bisa diambil oleh Dinas Kominfo adalah sebagai support dan enabler. Support berarti memberi bantuan dan handling jika terjadi permasalahan terkait penggunaan teknologi informasi, sedangkan enabler berarti menjadikan setiap bisnis proses di pemerintahan menjadi efektif, efisien dan ekonomis.

Target pengembangan SPBE Kabupaten Tanggamus selaras dengan rencana strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Rencana strategis tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Daerah dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, arsitektur teknologi informasi dan komunikasi, serta rencana strategis.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Tanggamus tahun 2022, target pengembangan SPBE selama 5 tahun mulai tahun 2024 – 2029 adalah meningkatkan indeks SPBE dari nilai 1,6 (Kurang) menjadi 3,50 (Sangat Baik). Detail target pengembangan indeks SPBE di Kabupaten Tanggamus dapat dilihat di tabel 9 berikut.

Tabel 9. Target Pengembangan Indeks SPBE

Domain/Aspek	Nilai Indeks SPBE Tahun 2022	Target Nilai Indeks SPBE Tahun 2029	Uraian Target
Kebijakan	2,30	3.50	Kebijakan Internal Telah Mengatur Standar Proses Tata
Kebijakan Tata Kelola	2,30	3.50	
Kebijakan Layanan	1,00	3.50	Kelola Bagi Semua Unit Organisasi Terkait, Tetapi Belum Mengatur Keselarasan Antar Proses Tata Kelola
Tata Kelola	1,00	3.50	Proses Tata Kelola Dilaksanakan Sepenuhnya Dengan Standarisasi Oleh Semua Unit Organisasi Terkait
Kelembagaan	1,00	3.50	
Strategi dan Perencanaan	1,00	3.50	
TIK	1,00	3.50	
Manajemen	1,00	3.50	Proses manajemen SPBE dan Audit TIK dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait

Domain/Aspek	Nilai Indeks SPBE Tahun 2022	Target Nilai Indeks SPBE Tahun 2029	Uraian Target
Penerapan Manajemen SPBE	1,00	3.50	
Audit TIK	1,95	3.50	
Layanan	1,70	3.50	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yang diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain
Layanan Administrasi Pemerintahan	1,95	3.50	
Layanan Publik	1,70	3.50	
INDEK SPBE	2,33	3.50	Sangat Baik

4.1. Target Kualitatif Penerapan SPBE

Pengembangan SPBE Kabupaten Tanggamus dapat dilihat di gambar 1, yang terdiri dari 4 kategori, yaitu:

Tata Kelola SPBE;

- Layanan SPBE; - Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
- Sumber Daya Manusia SPBE.

Tata Kelola	Layanan	TIK	SDM
<ul style="list-style-type: none"> • Tim Koordinasi SPBE • Arsitektur SPBE • Kebijakan SPBE • Evaluasi SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> • Survey Pengguna SPBE • Portal Pelayanan Publik • Portal Administrasi Pemerintahan • Manajemen Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Data • Jaringan Intra • Sistem Penghubung • Layanan Berbagi Pakai • Portal Data • Sistem Keamanan Informasi • Teknologi Kecerdasan Buatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi Literasi • Kapasitas ASN • Forum Kolaborasi SPBE

Gambar 2.. Inisiatif Strategis

4.1.1. Tata Kelola SPBE

Inisiatif Strategis pengembangan SPBE untuk kategori Tata Kelola SPBE, terdiri dari:

1. Pembangunan Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi.

Jenis Arsitektur SPBE Kabupaten Tanggamus terdiri atas:

- a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang disusun oleh masing-masing Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di antar instansi OPD;
- b. Arsitektur SPBE yang disusun oleh masing-masing instansi OPD dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing instansi OPD.

Pembangunan sistem arsitektur SPBE diperlukan untuk mengelola informasi terkait arsitektur SPBE Kabupaten Tanggamus agar memudahkan dalam pengelolaan arsitektur SPBE Kabupaten Tanggamus

2. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE

- a. Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk yang diketuai oleh Sekretaris Daerah;
- b. Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah dan Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat, Daerah dan Pemerintah Daerah;
- c. Kapasitas tim koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.

3. Manajemen SPBE

Serangkaian penerapan manajemen SPBE mengacu pada pedoman manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh peraturan menteri dan peraturan badan, serta berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau Standar Internasional.

4. Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE

Evaluasi penerapan kebijakan SPBE meliputi:

- a. Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Kabupaten Tanggamus;
- b. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE;
- c. Pelaksanaan evaluasi SPBE secara daerah dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Daerah;
- d. Setiap instansi OPD di Kabupaten Tanggamus dapat melakukan evaluasi SPBE secara periodik dan mandiri; dan
- e. Evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit TIK.

4.1.2. Layanan SPBE

Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Layanan SPBE terdiri dari:

1. Survey Pengguna SPBE
 - a. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE;
 - b. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan;

c. Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing instansi OPD Kabupaten Tanggamus.

2. Portal Layanan Publik Terintegrasi

a. Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah;

b. Jenis portal pelayanan publik terdiri atas portal pelayanan publik Kabupaten Tanggamus yang terdiri atas pelayanan publik semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus;

c. Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya;

d. Portal pelayanan publik dapat terdiri satu rumpun pelayanan publik, sebagai contoh portal perizinan terpadu dan portal pelayanan kependudukan terpadu. Selain itu, portal pelayanan publik dapat terdiri dari rumpun pelayanan publik yang berbeda, sebagai contoh semua layanan publik perangkat daerah di Kabupaten Tanggamus diintegrasikan ke dalam satu portal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus;

e. Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE.

f. Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT (Internet of Things);

g. Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum

berbagi pakai.

4.1.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

1. Penyediaan Pusat Data

a. Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi instansi daerah di Kabupaten Tanggamus;

b. Penyediaan Pusat Data ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi OPD untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama Pusat Data di Kabupaten Tanggamus;

c. Penyediaan Pusat Data dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan Pusat Data yang telah tersedia di Dinas Kominfotik yang memenuhi standar Pusat Data;

d. Pusat Data diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.

2. Penyediaan Jaringan Intra

a. Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah;

b. Penggunaan Jaringan Intra pemerintah ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya;

4.1.4. Sumber Daya Manusia SPBE

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Sumber Daya Manusia, terdiri dari:

1. Promosi literasi SPBE

- a. Promosi literasi SPBE merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada para Pengguna SPBE, baik pegawai ASN, pelaku usaha, maupun masyarakat;
 - b. Promosi literasi SPBE ditujukan untuk meningkatkan kepemimpinan SPBE, kompetensi teknis SPBE bagi pegawai ASN, dan pengetahuan umum SPBE bagi masyarakat sehingga pemanfaatan SPBE menjadi optimal;
 - c. Promosi literasi SPBE dapat dilakukan melalui antara lain: sosialisasi, pelatihan, diskusi, e-learning, dan berbagai forum lainnya.
2. Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
- a. Kualitas Layanan SPBE ditentukan oleh kapasitas ASN;
 - b. Peningkatan kapasitas ASN pelaksana SPBE dapat dilakukan antara lain melalui:
 - 1) Pengembangan pola rekrutmen yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ataupun Standar Kompetensi Kerja Internasional;
 - 2) pengembangan standar kompetensi teknis SPBE;
 - 3) pengembangan pola karir pegawai ASN melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE;
 - 4) pengembangan pola remunerasi untuk pegawai ASN di bidang SPBE; dan
 - 5) pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
3. Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah
- a. Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat;
 - b. Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:

- 1) penyampaian ide/ gagasan SPBE;
 - 2) pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK; peningkatan kompetensi teknis;
 - 3) perbaikan kualitas Layanan SPBE;
 - 4) penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
 - 5) penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama;
- c. Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

BAB V

ANALISIS KESENJANGAN

5.1 Domain Kebijakan

Kebijakan merupakan landasan yang menjadi acuan dalam kegiatan dan program yang akan dilakukan. Kebijakan akan terdiri dari Definisi, Pemutakhiran, Tujuan, Ruang Lingkup, Cakupan, Kebijakan, Peran dan Tanggung Jawab. Kebijakan pastinya masih harus diturunkan menjadi suatu SOP (Standar Operational Procedure) dan Instruksi Kerja yang akan memudahkan eksekusi di lapangan. Dalam Kebijakan Internal SPBE, terdiri dari 2 jenis aspek kebijakan, yaitu :

1. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
2. Kebijakan Internal Layanan SPBE

Tabel 10. Analisa Kesenjangan Domain Kebijakan

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Belum ada dan belum dilaksanakan	Ada dan dilaksanakan	Perlu Dibuat dan disosialisasikan
2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Belum ada dan belum dilaksanakan	Ada dan dilaksanakan	Perlu Dibuat dan disosialisasikan

5.2 Domain Tata Kelola

Tata kelola adalah memastikan bahwa target dan tujuan dapat tercapai dengan baik. Komponen dari Tata Kelola adalah target, stakeholder, perencanaan dan enabler (TIK). Target dan sasaran SPBE telah terdefiniskan, adanya lembaga yang bertugas untuk mengarahkan dan melaksanakan SPBE,

adanya program kerja dalam waktu tertentu untuk mewujudkan target, serta adanya alat bantu atau enabler berupa TIK yang mempermudah pencapaian target target yang telah ditetapkan.

Tabel 11. Analisa Kesenjangan Domain Tata Kelola

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Kelembagaan	Belum terdapat secara resmi Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana SPBE	Ada , memiliki tupoksi yang disahkan dan selalu berkoordinasi	Perlu dibuat lengkap dengan tupoksinya, disahkan dan disosialisasikan
2	Strategi dan Perencanaan	Belum memiliki Peta Rencana dan Arsitektur SPBE	Ada, disahkan dan disosialisasikan	Perlu dibuat dan disosialisasikan
3	TIK	Memiliki sebagian komponen TIK yang dibutuhkan serta yang ada belum optimal difungsikan	Ada dan berfungsi dengan baik, serta menjadi enabler bagi proses bisnis	Perlu dibangun, dikelola dan dijadikan agen perubahan proses bisnis

5.3 Domain Layanan

Layanan terpadu merupakan output dari SPBE yang akan dinikmati oleh masyarakat. Keterpaduan memiliki makna adanya single entry dan proses bisnis yang tersambung dalam suatu konteks tertentu. Kontek tersebut dapat berupa layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan perencanaan pembangunan, layanan tata naskah dinas dan lainnya. Kontek merupakan

turunan dari visi misi dan sasaran strategis pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan juga terhubung dalam RPJMN.

Tabel 12. Analisis Kesenjangan Domain Layanan

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Layanan Administrasi Pemerintahan	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan single entry	Layanan Terintegrasi dalam suatu kontek	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data
2	Layanan Publik	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan single entry	Layanan Terintegrasi dalam suatu kontek	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data

BAB VI

PETA RENCANA SPBE KABUPATEN TANGGAMUS

Berdasarkan analisis kesenjangan bersumber dari kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Tanggamus, selanjutnya dilakukan tahapan perencanaan pengembangan SPBE untuk mencapai target yang diinginkan selama 5 tahun ke depan.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Kabupaten Tanggamus terdiri dari :

- ✓ Tahapan pembangunan Fondasi SPBE tahun 2024 – 2025; dan
- ✓ Tahapan pengembangan SPBE tahun 2026 – 2029.



Gambar 3. Tahapan Rencana Strategis Pengembangan SPBE

Tahapan pembangunan fondasi SPBE dilaksanakan tahun 2024 – 2025 dan difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:

1. Arsitektur SPBE Kabupaten Tanggamus;
2. Pembentukan dan Fungsi Kerja Tim Koordinasi SPBE Daerah;
3. Kebijakan pendukung pelaksanaan Peraturan Presiden tentang SPBE;

4. Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
5. Kapasitas SDM TIK (Mindset/Pola Pikir dan Kompetensi) penyelenggara SPBE
6. Portal layanan publik, Portal administrasi pemerintahan, dan Portal data daerah;
7. Penerapan SPBE pada integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kepegawaian,
8. earsipan, dan pengaduan publik;
Manajemen Layanan SPBE (ITSM atau IT Service Management);
9. Infrastruktur SPBE (Pusat Data dan Jaringan Interkoneksi Tertutup antar OPD);
10. Sistem keamanan informasi (identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi).

Tahapan pengembangan SPBE dilaksanakan tahun 2024 - 2029 dan difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna Layanan SPBE. Pencapaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah:

1. Portal Layanan SPBE yang berbasis kecerdasan buatan dan big data;
2. Peningkatan kualitas jaringan pita lebar dan Jaringan Intra pemerintah;
3. Peningkatan jumlah Layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna;
4. Peningkatan kualitas keamanan informasi; dan
5. Peningkatan kapasitas SDM SPBE.

Tahapan-tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Kabupaten Tanggamus, selanjutnya dituangkan dalam Peta Rencana SPBE Kabupaten Tanggamus mulai tahun 2022 – 2026. Berikut Peta Rencana SPBE Kabupaten Tanggamus tahun 2022 – 2026 dapat dilihat di tabel 20.

6.1. Peta Rencana SPBE Kabupaten Tanggamus (2024 – 2029)

Tabel 13. Peta Rencana SPBE Kabupaten Tanggamus (2024 – 2029)

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
				2024	2025	2026	2027	2029	
A	Tata Kelola SPBE								
1	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Tanggamus	1.1	Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Tanggamus	Biro Organisasi dan Dinas Kominfo	✓				
		1.2	Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Tanggamus	Biro Organisasi dan Dinas Kominfo	✓				
		1.3	Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Tanggamus	Bappeda dan Dinas Kominfo	✓				
		1.4	Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Tanggamus	Dinas Kominfo	✓				
		1.5	Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Tanggamus	Dinas Kominfo	✓				
		1.6	Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Tanggamus	Dinas Kominfo	✓				

2	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tanggamus	2.1	Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tanggamus	Sekretariat Daerah	✓				
3	Penguatan Kebijakan SPBE	3.1	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang tim pengarah SPBE Kabupaten Tanggamus	Biro Organisasi, Biro Hukum dan Dinas Kominfo	✓				
		3.2	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang alur kerja terintegrasi antar OPD	Dinas Kominfo dan Biro Hukum	✓				
		3.3	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang rencana induk SPBE	Dinas Kominfo dan Biro Hukum	✓				
		3.4	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang perencanaan dan penganggaran TIK	Bappeda, BPKAD, Dinas Kominfo, dan Biro Hukum	✓				
		3.5	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pusat Data	Dinas Kominfo dan Biro Hukum	✓				

	3.6	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang integrasi sistem aplikasi	Dinas Kominfo dan Biro Hukum					
	3.7	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang penggunaan aplikasi umum berbagi pakai	Dinas Kominfo, Biro Organisasi, dan Biro Hukum					
	3.8	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Naskah Dinas Elektronik	Biro Organisasi, Dinas Kominfo, dan Biro Hukum					
	3.9	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Manajemen Kepegawaian	BKPPD, Biro Organisasi, dan Biro Hukum					
	3.10	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang manajemen perencanaan dan penganggaran	Bappeda, BPKAD dan Biro Hukum					
	3.11	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang sistem manajemen keuangan daerah	BPKAD dan Biro Hukum					
	3.12	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan manajemen kinerja	Biro Organisasi dan Biro Hukum					

		3.13	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang sistem layanan pengadaan	Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi Pembangunan, Dinas Kominfo, dan Biro Hukum	✓				
		3.14	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang sistem layanan pengaduan publik	Dinas Kominfo, Biro Organisasi, dan Biro Hukum	✓				
		3.15	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang jaringan dokumentasi dan informasi	Biro Hukum	✓				
		3.16	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan whistle blowing system	Inspektorat Daerah, Dinas Kominfo, dan Biro Hukum	✓				
		3.17	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan publik pemerintah daerah	Dinas Kominfo, Biro Organisasi, dan Biro Hukum	✓				
4	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE	4.1	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko SPBE	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓

		4.2	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>				
		4.3	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>				
		4.4	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>				
		4.5	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>				
		4.6	Audit TIK Kabupaten Tanggamus	Dinas Kominfo			<input checked="" type="checkbox"/>		
B	Layanan SPBE								
5	Survey Pengguna SPBE	5.1	Adanya survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan	Dinas Kominfo, Biro Organisasi	<input checked="" type="checkbox"/>				
6	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi	6.1	Adanya pembentukan integrasi proses bisnis pelayanan publik Kabupaten Tanggamus	Dinas Kominfo dan OPD terkait			<input checked="" type="checkbox"/>		
		6.2	Adanya portal pelayanan publik Kabupaten Tanggamus	Dinas Kominfo		<input checked="" type="checkbox"/>			
7	Portal Pelayanan Administrasi	7.1	Adanya pengembangan integrasi (Perencanaan, Penganggaran) dan (Pengadaan	Bappeda, BPKAD, Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/>				

	Pemerintah an Terintegrasi		Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)	Pembangunan, dan Dinas Kominfo					
		7.2	Adanya pengembangan integrasi Kepegawaian	BKD, Biro Organisasi, dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		7.3	Adanya pengembangan integrasi Kearsipan (e-dokumen persuratan)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Kominfo		✓			
		7.4	Adanya pengembangan integrasi Pengaduan Publik	Biro Organisasi, Inspektorat, dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		7.5	Adanya portal pelayanan administrasi pemerintahan	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
8	Penyelenggara an Manajemen Layanan	8.1	Adanya manajemen layanan yang merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas (Dokumen SOP Layanan)	Biro Organisasi	✓				

		8.2	Adanya portal pusat layanan service desk terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru	Dinas Kominfo						
C	Teknologi Informasi dan Komunikasi									
9	Pengembangan Pusat Data	9.1	Adanya pengembangan pusat data (baik berbasis pusat data nasional atau pengembangan yang ada) dengan standar internasional data center	Dinas Kominfo						
10	Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus	10.1	Adanya pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar OPD, UPT dan kelurahan	Dinas Kominfo						

11	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	11.1	Adanya pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah	Dinas Kominfo dan OPD Terkait					
12	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di Kabupaten Tanggamus	12.1	Tersedianya bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat	Dinas Kominfo					
13	Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai	13.1	Tersedianya layanan Cloud untuk Kabupaten Tanggamus	Dinas Kominfo					
14	Pembangunan Portal Data Daerah	14.1	Adanya pengembangan portal data Kabupaten Tanggamus	Dinas Kominfo dan Bappeda					
15		15.1	Adanya Manajemen Keamanan Informasi	Dinas Kominfo					

	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah	15.2	Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>				
		15.3	Adanya budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>				
16	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan	16.1	Adanya penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Tanggamus	Dinas Kominfo dan OPD terkait				<input checked="" type="checkbox"/>	
		16.2	Adanya penerapan Machine Learning untuk analisa data menuju kecerdasan buatan	Dinas Kominfo dan OPD terkait					<input checked="" type="checkbox"/>
D	Sumber Daya Manusia								
17	Promosi Literasi SPBE	17.1	Adanya Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE	BKD dan Dinas Kominfo Bidang Komunikasi	<input checked="" type="checkbox"/>				

18	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE	18.1	Adanya Standar Kompetensi SDM Teknis Penyelenggara SPBE	Dinas Kominfo dan BKPPD	✓				
		18.2	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE (Pranata Komputer)	BKD dan Sekretariat Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		18.3	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE	BKD dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
19	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan Non pemerintah	19.1	Adanya Forum Kolaborasi SPBE	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓

6.2 Percepatan Penerapan SPBE Kabupaten Tanggamus

Moratorium pembangunan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum dilakukan agar masing-masing instansi pemerintah tidak membangun aplikasi sendiri-sendiri yang berdampak pada pemborosan anggaran yang akan mengakibatkan terjadinya in-efisiensi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dan dukungan seluruh pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Percepatan SPBE diwujudkan melalui penerapan aplikasi umum dan infrastruktur SPBE. Dalam penerapan aplikasi umum, akan dilakukan melalui empat quick wins SPBE, antara lain integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, integrasi layanan kepegawaian, integrasi layanan kearsipan, dan integrasi layanan pengaduan layanan publik. Sementara, pada infrastruktur SPBE terdapat dua fokus, yaitu pembangunan pusat data dan jaringan intra-pemerintah. Infrastruktur SPBE ini diperlukan untuk mendukung atau mendorong keempat integrasi aplikasi umum.

BAB VII

DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI

Rencana proyek implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengacu pada rencana pembangunan SPBE Kabupaten Tanggamus yang disusun selama 5 tahun ke depan. Implementasi SPBE merupakan inisiatif-inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan SPBE bagi Pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus.

Dalam setiap inisiatif SPBE ditentukan nama program, inisiatif strategis, tahun, penanggung jawab, dan rincian kegiatan. Detail inisiatif SPBE Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

Program 1.1. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Tanggamus

Kode Program	1.1
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Tanggamus
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Tanggamus
Tahun	2024 – 2029
Penanggungjawab	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo

<p>Rincian Kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Bisnis • Memahami alur kerja Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun dokumen arsitektur bisnis • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD Inovasi Proses Bisnis • Melakukan FGD Review dan evaluasi Peta Proses Binis • Implementasi proses bisnis digital (workflow, authorization), dan penerapan sistem manajemen dokumen elektronik untuk semua kebijakan dan SOP
<p>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal (Permen PANRB 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah). • Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal. • Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan dokumentasi penerapan Inovasi Proses Bisnis melalui sistem elektronik. • Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi Inovasi Proses Bisnis, bukti undangan rapat reuiu dan evaluasi Inovasi Proses Bisnis, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reuiu dan evaluasi Inovasi.

Program 1.2. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Tanggamus

Kode Program	1.2
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Tanggamus
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Tanggamus
Tahun	2024 – 2029
Penanggungjawab	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Layanan • Memahami daftar layanan dan alur kerja dari proses layanan Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Tanggamus • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur layanan

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Dokumen Arsitektur Layanan SPBE Kabupaten Tanggamus
- Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur layanan SPBE
- Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur Layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE.
- Dokumentasi Arsitektur Layanan SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE.

Program 1.3. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Tanggamus

Kode Program	1.3
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Tanggamus
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Tanggamus
Tahun	2024-2029
Penanggungjawab	Bappelbangda dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Data • Memahami alur data Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Tanggamus • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi pada perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD reuiu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur data

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Tanggamus
- Bukti undangan rapat reuiu dan evaluasi arsitektur data
- Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Arsitektur Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Arsitektur Data.
- Dokumentasi Arsitektur Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Arsitektur data.

Program 1.4. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Tanggamus

Kode Program	1.4
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Tanggamus
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Tanggamus
Tahun	2024 - 2024
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Aplikasi • Memahami alur aplikasi dari proses bisnis Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Tanggamus • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur aplikasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Tanggamus • Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur aplikasi • Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur aplikasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur aplikasi. • Dokumentasi arsitektur aplikasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur aplikasi.

Program 1.5. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Tanggamus

Kode Program	1.5
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Tanggamus
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Tanggamus
Tahun	2024-2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Infrastruktur • Memahami komponen dan topologi infrastruktur Teknologi Informasi (jaringan dan server) Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Tanggamus • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur infrastruktur SPBE

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Dokumen Arsitektur Infrastruktur SPBE Kabupaten Tanggamus
- Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur infrastruktur
- Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur infrastruktur, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur infrastruktur, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur infrastruktur.
- Dokumentasi arsitektur infrastruktur yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur infrastruktur.

Program 1.6. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Tanggamus

Kode Program	1.6
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Tanggamus
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Tanggamus
Tahun	2024-2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo Bidang Komunikasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Keamanan Informasi • Memahami komponen, topologi dan proses keamanan informasi Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro , sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun dokumen arsitektur keamanan informasi • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah • Melakukan FGD reuiu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur infrastruktur SPBE.

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi SPBE Kabupaten Tanggamus
- Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur keamanan informasi
- Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur keamanan informasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur keamanan informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur keamanan informasi.
- Dokumentasi arsitektur keamanan informasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur infrastruktur.

Program 2.1. Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE
Kabupaten Tanggamus

Kode Program	2.1
Nama Program	Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tanggamus
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tanggamus
Tahun	2024 - 2029
Penanggungjawab	Setda/Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan Anggota Tim Koordinasi SPBE • Menentukan Tupoksi Tim • Merumuskan isu-isu strategis terhadap perkembangan SPBE • Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikutnya sebagai tindak lanjut • Menerbitkan SK Tim SPBE • Membuat dokumen tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE • Membuat laporan berkala Tim Koordinasi SPBE • Penyediaan sarana komunikasi dan kolaborasi • Sosialisasi dan harmonisasi program kerja Tim Koordinasi SPBE • FGD reviu dan evaluasi program kerja Tim Koordinasi SPBE

<p>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Struktur Tim Koordinasi SPBE, foto dan dokumen lainnya terkait Tim Koordinasi SPBE beserta tugas/program kerja• Notulensi/catatan/laporan hasil pembentukan Tim Koordinasi SPBE• Bukti undangan rapat pembentukan Tim Koordinasi SPBE• Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembentukan Tim Koordinasi SPBE• Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan/atau tangkapan layar• Foto dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan tugas seluruh unit kerja/perangkat daerah• Notulensi/catatan/laporan reviu atau evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE
--	--

Program 3.1. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tanggamus

Kode Program	3.1
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tanggamus
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2025
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reuiu kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN • Identifikasi isi kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini mencakup tugas-tugas Tim Koorodinasi SPBE untuk mendukung penerapan SPBE antar OPD dan mencakup seluruh OPD, kolaborasi penerapan SPBE antar pemerintah daerah, propinsi dan pusat • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah daerah dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reuiu dan evaluasi kebijakan Tim Koorodinasi SPBE Kabupaten Tanggamus
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait TIM Koordinasi SPBE yang sudah disahkan • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait tim koordinasi SPBE

Program 3.2. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Arsitektur SPBE

Kode Program	3.2
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Arsitektur SPBE
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2024
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu serta isi kebijakan yang akan dibuat, yaitu terkait kebijakan Arsitektur SPBE dengan komponen lengkap meliputi Arsitektur Bisnis, Layanan, Data, Aplikasi, Infrastruktur dan Keamanan, serta mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan penetapan dan kebijakan yang melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Arsitektur SPBE

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Kebijakan yang telah ditetapkan mengatur tentang Arsitektur SPBE dengan komponennya secara lengkap serta telah mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi, baik antar sesama instansi, dengan daerah, maupun dengan pusat.
- Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait arsitektur SBPE.

Program 3.3. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Data

Kode Program	3.3
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Data
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2025
Penanggungjawab	Bappelbangda, Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu, serta isi kebijakan Manajemen Data dengan komponen lengkap meliputi Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Indikator Kualitas Data dan Interoperabilitas Data • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Manajemen Data

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Kebijakan terkait manajemen data yang telah ditetapkan. Seluruh rangkaian proses pengelolaan data telah tercantum dalam kebijakan tersebut. Lingkup pengaturan yang tercantum meliputi Kebijakan dan Panduan Teknis Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi. Penetapan Definisi, Ruang Lingkup dan Indikator Kualitas Data dan Interoperabilitas Data.
- Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait manajemen data

Program 3.4. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE

Kode Program	3.4
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dengan komponen lengkap meliputi Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan Informasi dan Audit TIK • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Peta Rencana SPBE
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan yang telah ditetapkan mengatur tentang Peta Rencana SPBE dengan komponennya secara lengkap serta telah mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi, baik antar sesama instansi, dengan Propinsi, maupun dengan pusat • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait arsitektur SPBE

Program 3.5. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Layanan Pusat Data

Kode Program	3.5
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Layanan Pusat Data
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah, isu dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan pusat data, analisis risiko dan keamanan pusat data, standar pusat data yang digunakan, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Menetapkan Standar Tingkatan/Rating Pusat Data • Membuat Pedoman Teknis Pengelolaan Operasional Pusat Data • Membuat kebijakan tentang interkoneksi layanan pusat data dengan pusat data nasional • Membuat SOP Pusat Data • Melakukan FGD Reviu dan evaluasi kebijakan Pusat Data

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Kebijakan terkait layanan pusat data yang telah ditetapkan
- Dokumen pedoman pengelolaan operasional pusat data dan pedoman penggunaan layanan pusat data untuk seluruh unit kerja
- Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait layanan pusat data

Program 3.6. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra

Kode Program	3.6
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi isi, masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Pembuatan Kebijakan dan SOP Penggunaan Jaringan Intra • Sosialisasi Penggunaan Layanan Jaringan Intra • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Kebijakan terkait pengoperasian jaringan intra yang mengatur tentang interkoneksi layanan jaringan intra yang telah ditetapkan
- Pengaturan penggunaan layanan jaringan intra instansi untuk seluruh unit kerja
- Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait layanan jaringan intra

Program 3.7. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

Kode Program	3.7
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Sistem Penghubung Layanan
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi isi, masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, penanggungjawab dan pelaksana kebijakan, serta mencakup interkoneksi dengan sistem penghubung layanan instansi • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Pembuatan kebijakan dan SOP penggunaan Sistem Penghubung Layanan • Sosialisasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang Sistem Penghubung Layanan

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi yang telah ditetapkan.
- Pengaturan penggunaan sistem penghubung layanan untuk seluruh unit kerja
- Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi.

Program 3.8. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi

Kode Program	3.8
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Pembangunan Aplikasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan tentang pembangunan aplikasi yang sudah ditetapkan • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait pembangunan aplikasi

Program 3.9. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi

Kode Program	3.9
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2024
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah, isu dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, yang mengatur secara lengkap ruang lingkup, penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan untuk seluruh OPD • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Membuat SOP dan Pedoman Keamanan Informasi • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Manajemen Keamanan Informasi

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Kebijakan terkait keamanan informasi yang telah ditetapkan
- Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait manajemen keamanan informasi.

Program 3.10. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Audit TIK

Kode Program	3.10
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Audit TIK
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2024
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah, isu dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, yang mencakup pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan) • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Membuat pedoman teknis Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan • Melakukan FGD Reviu dan evaluasi kebijakan Audit TIK

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Kebijakan terkait audit TIK yang telah ditetapkan. Pengaturan/norma pelaksanaan audit TIK yang tertuang dalam kebijakan tersebut telah mengatur pelaksanaan seluruh audit TIK (infrastruktur, aplikasi, keamanan).
- Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait audit TIK
- Notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal
- Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan

Program 4.1. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko

Kode Program	4.1
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2024-2029
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pedoman/kebijakan Manajemen Risiko berdasarkan permenPAN RB Nomor 5 Tahun 2020 • Melakukan identifikasi dan menyusun daftar risiko SPBE • Melakukan asesmen risiko SPBE • Melakukan analisis dan pengendalian risiko SPBE • Menyusun dokumen manajemen/kontrol risiko SPBE • Melaksanakan proses pengendalian risiko sesuai dengan hasil rekomendasi • Melakukan evaluasi manajemen risiko

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Bukti dokumen penetapan program kerja (renja) yang terencana/terarah terkait Manajemen Risiko SPBE.
- Bukti undangan, MoM, dan output eksekusi
- Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari permenpanRB no 5/2020, sudah ditetapkan.
- Bukti Output penerapan kegiatan Manajemen Risiko SPBE
- Dokumen kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE/Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah
- Notulensi/catatan hasil reviu dan evaluasi secara berkala
- Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Risiko SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE
- Dokumentasi penerapan Manajemen Risiko SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE.

Program 4.2. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data

Kode Program	4.2
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2024-2029
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pedoman manajemen data berdasarkan PermenPPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 • Menyusun arsitektur data • Menyusun desain dan model data • Menentukan struktur fisik penyimpanan data dan pengelolaannya • Memastikan keamanan data yang meliputi confidentiality, integrity dan availability data • Menyusun dan menerapkan integrasi dan interoperability data • Melakukan pengelolaan data yang berupa file dan dokumen non elektronik agar dapat diakses dan diintegrasikan dengan data elektronik • Melakukan pengelolaan, menjaga kualitas dan standarisasi data berbagi pakai (data referensi dan master data) • Melakukan pengelolaan data warehouse dan data lake yang digunakan untuk proses analisis data sebagai data laporan dan analisis pendukung pengambilan keputusan • Melakukan pengumpulan, pengkategorian, perawatan, pengintegrasian, pengendalian, dan pengelolaan metadata • Melakukan evaluasi dan monitoring kualitas data

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Data yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya (pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman Manajemen Data yang berlaku)
- Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari PERMENPPN 16/2020.
- Bukti output kegiatan pengendalian manajemen data sesuai pedoman Manajemen Data dimana pelaksanaannya sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data
- Bukti penetapan formal (Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE Instansi) atas kebijakan Manajemen Data yang diberlakukan kepada seluruh unit kerja.
-
- Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan

manajemen data

- Notulensi/catatan/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data
- Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Data

Program 4.3. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK

Kode Program	4.3
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2024-2029
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pedoman manajemen aset TIK (proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK) • Menyusun perencanaan aset TIK • Melakukan manajemen pengadaan aset TIK • Melakukan manajemen operasional dan perawatan aset TIK • Melakukan monitoring aset ITK • Melakukan manajemen dalam penggantian atau perbaikan aset TIK • Melakukan manajemen pembuangan aset TIK yang sudah tidak terpakai • Membuat sistem informasi manajemen aset TIK • Integrasi portofolio layanan SPBE dengan aset TIK

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Dokumen Renja terkait manajemen Aset TIK
- Bukti pelaksanaan pengendalian Manajemen Aset TIK yang sudah mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK
- Pedoman manajemen aset TIK formal yang sudah ditetapkan.
- Dokumen register/daftar aset TIK (terbatas di unit TIK)
- Dokumen register/daftar aset TIK di seluruh unit kerja.
- Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen aset TIK
- Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Aset TIK, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK
- Dokumentasi penerapan Manajemen Aset TIK yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK

Program 4.4. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan

Kode Program	4.4
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2024-2029
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pedoman manajemen perubahan • Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber • Menggunakan dan mengkesploitasi informasi yang dikumpulkan untuk merespon kebutuhan pengguna • Mengumpulkan informasi tambahan dan memperkaya dengan lebih banyak wawasan • Berbagi pengetahuan dan wawasan • Menilai informasi dan pengetahuan yang diperlukan agar sesuai dengan strategi organisasi • Membangun pengetahuan ekstra tentang topik-topik penting dan tidak memakai lagi pengetahuan yang sudah usang • Membangun sistem manajemen pengetahuan (Knowledge Management System) dalam bentuk sistem informasi • Penerapan pedoman dengan menggunakan sistem atau aplikasi manajemen pengetahuan

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan
- Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Pengetahuan" Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Pengetahuan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya
- Dokumen renja terkait manajemen pengetahuan, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus manajemen pengetahuan
- Pedoman formal mengenai manajemen pengetahuan.
- Aplikasi manajemen pengetahuan yang

digunakan

(manual/screenshot/video/demo)

- Bukti penerapan Manajemen Pengetahuan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Pengetahuan yang telah ditentukan/ditetapkan
- Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Pengetahuan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja
- Dokumen reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan
- Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen pengetahuan (termasuk aplikasinya)

Program 4.5. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan

Kode Program	4.5
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2024-2029
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pedoman manajemen perubahan • Mengidentifikasi hal-hal terkait SPBE yang perlu ditingkatkan • Menyampaikan usulan perubahan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan • Menyusun perencanaan perubahan • Menyiapkan dan menyediakan segala sumber daya dan data untuk mendukung proses perubahan • Melakukan sosialisasi tentang perubahan yang dilakukan • Melakukan pemantauan dan pengelolaan terkait risiko perubahan, resistansi dan dampak dari perubahan • Melakukan evaluasi, revisi dan perbaikan secara terus menerus • Mengembangkan sistem manajemen perubahan • Menerapkan pedoman dengan sistem atau aplikasi manajemen perubahan

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Perubahan
- Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Perubahan
- Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Perubahan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya
- Dokumen renja terkait manajemen perubahan, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus manajemen perubahan.
- Pedoman formal mengenai manajemen perubahan.
- Aplikasi manajemen perubahan yang

digunakan

(manual/screenshot/video/demo)

- Bukti penerapan Manajemen Perubahan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Perubahan yang telah ditentukan/ditetapkan
- Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Perubahan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja
- Dokumen reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan
- Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen perubahan (termasuk aplikasinya)

Program 4.6. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Layanan

Kode Program	4.6
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Layanan (merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas)
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penyelenggaraan Manajemen Layanan
Tahun	2024-2029
Penanggungjawab	Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat dokumen kebijakan Manajemen Layanan SPBE • Membuat dokumen siklus layanan SPBE (Strategi, Pengembangan, Operasional dan Evaluasi) • Membuat SOP disetiap siklus nya dengan RACI (Responsible, Accountable, Consult, Inform) bagi personel yang mengampunya • Monitor dan evaluasi kinerja dan pencapaian SLA dari penyedia jasa pihak ketiga secara berkala • Pengembangan sistem manajemen layanan SPBE (Helpdesk, manajemen insiden, manajemen kapasitas, manajemen konfigurasi) • Implementasi sistem Manajemen Layanan SPBE • Penerapan SLA Layanan SPBE • Penerapan Manajemen Layanan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen layanan yang telah ditetapkan dan terdokumentasi • Review dan evaluasi penerapan aplikasi manajemen pengetahuan • Penyusunan revisi penyempurnaan sistem manajemen layanan SPBE berdasarkan hasil reuiu dan telaahan

Data Dukung Penilaian SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE • Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Layanan SPBE • Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Layanan SPBE yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya
	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen renja terkait Manajemen Layanan SPBE, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus Layanan SPBE • Prosedur formal manajemen layanan yang mencakup semua proses manajemen layanan. • Aplikasi manajemen layanan yang digunakan (manual/screenshot/video/demo). • Dokumen Katalog Layanan dan SLA layanan • Aplikasi Helpdesk TIK yang digunakan (manual/screenshot/video). • Notulensi rapat/laporan evaluasi manajemen layanan • Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen layanan SPBE (termasuk aplikasinya)

Program 4.7. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen SDM SPBE

Kode Program	4.7
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen SDM SPBE
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
Tahun	2024-2029
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan BKPP

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan konsep penerapan manajemen SDM SPBE ▪ Memahami Tugas Pokok Fungsi dari penyelenggara SPBE ▪ Mengambil acuan/referensi Kompetensi TIK yang ada (SKKNI atau sumber lainnya yang diakui oleh Pemerintah Indonesia) ▪ Menentukan Job Role dalam penyelenggaraan SPBE ▪ Menentukan kompetensi untuk Job Role Penyelenggara SPBE ▪ Menetapkan standar kompetensi sebagai acuan penerimaan dan kinerja penyelenggara SPBE ▪ Melaksanakan program pengembangan SDM SPBE (asesmen dan pelatihan) ▪ Penerapan Assessment Kompetensi SDM SPBE ▪ Pengembangan SDM SPBE ▪ Monitoring Kinerja SDM SPBE dan Kompetensinya ▪ Review dan evaluasi penerapan manajemen SDM SPBE
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan revisi penyempurnaan kerangka kompetensi SDM SPBE berdasarkan hasil revidi dan telaahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentasi perencanaan/formasi SDM ▪ Dokumen Kerangka Kompetensi SDM SPBE yang sudah ditetapkan ▪ Dokumen roadmap pelatihan ▪ Laporan pemenuhan/realisasinya ▪ Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi kinerja/kompetensi SDM TIK.

Program 4.8. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi

Kode Program	4.8
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan)
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis Tahun	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah 2024-2029
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan/Perbaikan dokumen kebijakan manajemen keamanan informasi SPBE • Melakukan asesmen keamanan berbasis INDEKS KAMI • Menemukan gap analysis untuk tindakan koreksi yang harus dilakukan. • Penerapan kendali dan protokol keamanan informasi sistem informasi • Menyusun kebijakan, standar dan SOP untuk identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan dan evaluasi Keamanan Informasi • Menyusun SPM/SLA dan SOP Pelayanan Keamanan Informasi • Peningkatan kompetensi SDM TIK tentang Keamanan Informasi • Pembentukan CSIRT (Computer Security Incident Response Team) • Penyusunan dokumen Cyber Security Incident Response Plan • Pendampingan dan pemberian saran mengenai hukum dan legalitas • Perbaikan dokumen Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi SPBE (Information

	<p>sensitivity policy, password policy, internal control policy, dsb), Penyusunan SOP Manajemen Insiden, Penyusunan SOP Proteksi Aset SPBE</p> <ul style="list-style-type: none">• Penetapan proses pengendalian Keamanan Informasi melalui kebijakan formal• Penetapan kebijakan strategis keamanan informasi kepada seluruh unit kerja• Review dan evaluasi penerapan keamanan informasi• Penyusunan revisi penyempurnaan manajemen keamanan informasi berdasarkan hasil reuiu dan telaahan
--	--

<p>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Draf/rancangan penerapan Keamanan Informasi • Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi • Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Keamanan Informasi • Dokumentasi kegiatan pengendalian Keamanan Informasi yang selaras dengan arah dan perencanaan program dimana pelaksanaannya dilakukan oleh sebagian atau seluruh unit kerja • Bukti penetapan/pengesahan formal (permen/perbup) atas manajemen keamanan informasi (umumnya disebut dokumen “Manual SMKI”). • Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja. • Notulen/output atas evaluasi • Notulensi/catatan/laporan hasil revidi/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Keamanan Informasi • Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi • Dokumentasi penerapan Keamanan Informasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi
--	---

Program 4.9. Pelaksanaan Audit TIK Kabupaten Tanggamus

Kode Program	4.9
Nama Program	Pelaksanaan Audit TIK Kabupaten Tanggamus
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2025 dan 2029
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan komponen audit TIK (keamanan, aplikasi, infrastruktur) • Membuat pedoman audit infrastruktur sesuai Perban BPPT • Membuat pedoman audit aplikasi sesuai Perban BPPT • Membuat pedoman audit keamanan sesuai Perban BSSN • Memilih lembaga Audit TIK (BSSN atau lembaga kredibel) • Melakukan audit (secara berkala) • Menganalisa hasil audit • Membuat dokumen audit • Melakukan tindakan koreksi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya renja terkait kegiatan audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan. • Adanya hasil audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan yang valid (selambat-lambatnya 2 tahun sekali). • Laporan hasil audit internal infrastruktur, aplikasi, dan keamanan yang valid oleh tim auditor internal • Rujukan pedoman audit infrastruktur • Laporan hasil audit eksternal aplikasi yang valid oleh auditor eksternal tersertifikasi • Notulensi rapat/laporan hasil tindak lanjut atas temuan audit.

Program 5.1. Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan

Kode Program	5.1
Nama Program	Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Inisiatif Strategis	Survei Pengguna SPBE
Tahun	2024-2029
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat metode survei (elektronik atau manual) • Menentukan kuesioner survei • Mengumpulkan data • Melakukan analisa data hasil survei • Menampilkan hasil survei

Program 6.1. Pengembangan Integrasi Portal Pelayanan Publik Kabupaten Tanggamus

Kode Program	6.1
Nama Program	Pembentukan integrasi Portal Pelayanan Publik Kabupaten Tanggamus
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi
Tahun	2024 - 2029
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur proses bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Membuat aplikasi elektronik untuk setiap bisnis proses atau alur kerja • Membentuk integrasi database atau integrasi aplikasi berbasis web service • Membentuk antarmuka satu pintu untuk layanan publik • Menerapkan Single Sign On • Melakukan integrasi dan interoperability dengan aplikasi pelayanan publik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Pusat

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal
- Notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di Intansi dengan Unit pengelola TIK.

Program 7.1. Pembentukan integrasi (Perencanaan,Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)

Kode Program	7.1
Nama Program	Pembentukan integrasi (Perencanaan,Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2024-2029
Penanggungjawab	Bappelbangda, BKD, Biro Pengadaaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi Pembangunan, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Memastikan bisnis proses telah terintegrasi (perencanaan, penganggaran, SAKIP, MONEV) • Memastikan adanya aplikasi untuk tiap proses • Menggunakan sistem penghubung • Atau membangun single database untuk seluruh proses • Membangun satu pintu masuk untuk kegiatan perencanaan. • Memastikan valid dan cek integritas data dari satu proses ke proses lainnya • Melakukan integrasi dan interoperability dengan aplikasi sejenis yang dimiliki Pemerintah Daerah dan Pusat

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh)
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur

	<p>aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. • Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE • Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE"
--	---

Program 7.2. Pengembangan Integrasi Kepegawaian

Kode Program	7.2
Nama Program	Pengembangan Integrasi Kepegawaian
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2024-2029
Penanggungjawab	BKPP, Bagian Organisasi, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah dibuat, baik makro atau mikro • Menginventaris seluruh layanan kepegawaian yang ada • Memastikan kesiapan aplikasi dari setiap layanan • Menggunakan sistem penghubung layanan jika aplikasi masih terpisah pisah • Mengintegrasikan dengan aplikasi BKN dan aplikasi lain di luar kepegawaian • Lalu membuat satu pintu masuk layanan kepegawaian baik via web atau mobile • Melakukan integrasi dan interoperability dengan sistem kepegawaian yang dimiliki Pemerintah Daerah dan Pusat

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Kepegawaian
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh)

untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.
- Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE

Program 7.3. Pembentukan Integrasi Kearsipan

Kode Program	7.3
Nama Program	Pembentukan Integrasi Kearsipan
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2024-2025
Penanggungjawab	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Menerapkan undang undang arsip nasional• Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro• Melakukan konversi elektronik dari dokumen atau arsip kertas• Menerapkan sistem manajemen arsip secara elektronik• Mengintegrasikan dengan aplikasi perkantoran dan kepegawaian• Membuat satu pintu masuk ke pencarian arsip daerah• Melakukan integrasi dan interoperability dengan aplikasi kearsipan Pemerintah Daerah dan Pusat

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengarsipan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi).
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengarsipan
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

	<ul style="list-style-type: none"> • "Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. • Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE • Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE"
--	---

Program 7.4. Pembentukan integrasi Pengaduan Publik

Kode Program	7.4
Nama Program	Pembentukan integrasi Pengaduan Publik
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2024-2029
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Inspektorat, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Menentukan single contact pengguna dalam (nomor telepon dan aplikasi) • Meng-integrasikan sistem OPD yang masuk dalam pengaduan (Kerusakan jalan, kekerasan, harga pangan, dan sebagainya) • Membuat sistem penyaringan pengaduan dan mengarahkan ke fungsi OPD yang sesuai • Melakukan pencatatan (log) • Memonitor waktu respon • Tracking penyelesaian pengaduan • Eskalasi pengaduan dengan kriteria • Evaluasi pengaduan secara berkala • Melakukan integrasi dan interoperability dengan sistem Pengaduan Publik milik Pemerintah

	Daerah dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengarsipan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi).• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download

(unduh) dokumen terkait Pengarsipan

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.
- Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE

Program 7.5. Pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahan

Kode Program	7.5
Nama Program	Pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahan
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis
	Pemerintahan Berbasis Elektronik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2024-2029
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis, arsitektur layanan, arsitektur aplikasi dan arsitektur data milik pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Memastikan proses bisnis layanan pemerintahan sudah terintegrasi • Memastikan layanan pemerintah sudah terintegrasi secara aplikasi atau sudah berbasis elektronik, pada suatu lingkup tertentu • Membuat antarmuka satu pintu portal yang dapat diakses pengguna baik dalam format web atau mobile • Menerapkan SSO (Single Sign On) pada portal yang ada • Melakukan integrasi dan interoperability dengan sistem pelayanan administrasi pemerintahan Daerah dan Pusat

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengarsipan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi).
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengarsipan
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

- "Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.
- Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE

Program 8.1. Pembentukan portal pusat layanan internal (service desk)

Kode Program	8.1
Nama Program	Pembentukan portal pusat layanan internal (service desk) terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penyelenggaraan Manajemen Layanan
Tahun	2024 - 2029
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun perencanaan dan membangun portal pusat layanan internal yang terdiri dari terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan/kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru • Mendidik SDM yang memahami konsep IT Service Management (ITSM) • Membuat SLA layanan • Menerapkan sistem Service Desk dengan prinsip Single Point of Contact • Melakukan evaluasi berkala terhadap keluhan dan masalah yang ada • Melakukan perbaikan layanan dan pemenuhan SLA

Program 9.1. Pengembangan pusat data dengan standar internasional data center

Kode Program	9.1
Nama Program	Penyediaan pusat data dengan standar internasional data center
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Inisiatif Strategis	Penyediaan Pusat Data
Tahun	2024 -2029
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<p>Menggunakan Pusat Data Nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengajuan layanan IaaS ke Kementerian Kominfo • Melakukan proses migrasi server dan layanan ke PDN <p>Menggunakan Pusat Data (Data Center) sendiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan asesmen data center berbasis TIA 942 , untuk mengukur kelayakan rated internasional • Menganalisa tindakan koreksi dari asesmen • Menyiapkan anggaran untuk program perbaikan • Perbaikan dari aspek fisik gedung, perangkat hardware, SOP dan SDM • Pembuatan Kebijakan pengelolaan operasional pusat data. • Sosialisasi dan Harmonisasi layanan pusat data ke seluruh unit kerja • Pembuatan prosedur pengoperasian layanan pusat data. • Pembuatan prosedur pemeliharaan dan perawatan pusat data • Pengembangan interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Layanan Pusat Data Nasional. • FGD review dan evaluasi layanan pusat data • Penyusunan revisi penyempurnaan layanan pusat data berdasarkan hasil reuiu dan telaahan

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Katalog (Daftar/katalog unit kerja pengguna pusat data terpusat berserta alamat aksesnya), Bukti Penerapan (Bukti atas penerapan "Prosedur Pengoperasian Baku").
- Laporan/bukti sosialisasi harmonisasi layanan pusat data
- Log penggunaan layanan pusat data dari masing-masing unit kerja
- Katalog layanan pusat data.
- Prosedur Pengoperasian Baku Pusat Data.
- Prosedur pemeliharaan dan perawatan Pusat

	<p>Data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notulensi review dan evaluasi layanan Pusat Data • Dokumen Perubahan/ Penyempurnaan Pusat Data
--	---

Program 10.1. Evaluasi, Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Interkoneksi Tertutup Antar OPD

Kode Program	10.1
Nama Program	Evaluasi, optimalisasi dan pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar OPD
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.01.3 : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Inisiatif Strategis	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus
Tahun	2024-2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan infrastruktur jaringan • Penyediaan fasilitas backup jaringan • Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Jaringan • Evaluasi Kinerja dan Audit Log Jaringan • Penerapan VPN (Virtual Private Network) untuk akses jaringan secara remote • Pembuatan Kebijakan tentang Interkoneksi Jaringan dengan Instansi lain; • Perbaikan SOP Jaringan Intra, Pembuatan Laporan Review Jaringan Intra • Penyusunan revisi penyempurnaan jaringan intra berdasarkan hasil reuiu dan telaahan

Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Katalog layanan Jaringan Intra • Prosedur operasional layanan jaringan intra • Prosedur pemeliharaan dan • Katalog layanan Jaringan Intra • Laporan/bukti sosialisasi harmonisasi layanan jaringan intra • Log penggunaan layanan jaringan intra dari masing-masing unit kerja perawatan jaringan intra • Prosedur Pengoperasian Baku jaringan intra. • Prosedur pemeliharaan dan perawatan jaringan intra • Notulensi review dan evaluasi layanan jaringan intra • Dokumen Perubahan/ Penyempurnaan jaringan intra
---	--

Program 11.1. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Kode Program	11.1
Nama Program	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Inisiatif Strategis	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Tahun	2024-2029
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD Terkait

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan ruang lingkup dan indikator layanan • Pembuatan dokumen desain API dan microservices • Memastikan kebijakan integrasi dipahami • Memastikan teknologi dan open aplikasi pada OPD yang akan di integrasi kan • Melakukan instalasi dan konfigurasi SIMANTRA/WEB-API untuk mengambil output data dari setiap sistem yang akan dihubungkan. • Melakukan pengembangan API dan microservices layanan • Pengembangan pedoman pengoperasian Sistem Penghubung Layanan dengan Sistem Penghubung Layanan antar instansi, dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan • Penyusunan revisi penyempurnaan sistem penghubung layanan berdasarkan hasil reuiu dan telaahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi • Notulensi/catatan/laporan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi • Bukti undangan rapat terkait penerapan Sistem Penghubung Layanan Instansi • Tangkapan layar integrasi antar aplikasi/data/ layanan SPBE yang digunakan pada sebagian unit kerja dan telah didokumentasikan secara formal • Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan dengan Sistem Penghubung Layanan antar instansi,

dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan

- Notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi
- Bukti undangan rapat evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi
- Dokumentasi berupa tautan dan/atau tangkapan layar Sistem Penghubung Layanan Instansi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi

Program 12.1. Penyediaan bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat

Kode Program	12.1
Nama Program	Penyediaan bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.01.3 : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Inisiatif Strategis	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di Kabupaten Tanggamus
Tahun	2024-2029
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa kebutuhan bandwidth per OPD • Melakukan penambahan kapasitas bandwidth jika diperlukan • Melakukan QoS, untuk mengatur kebutuhan bandwidth • Memastikan sumber internet OPD terpusat melalui Dinas Kominfo • Pemantauan jaringan internet dan intranet dengan NMS (Network Monitoring System) • Penyediaan fasilitas backup jaringan internet

Program 13.1. Penyediaan layanan Cloud untuk Kabupaten Tanggamus

Kode Program	13.1
Nama Program	Penyediaan layanan Cloud untuk Kabupaten Tanggamus
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Inisiatif Strategis	Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai
Tahun	2024-2029
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk data center yang berbasis virtualisasi • Menetapkan jenis layanan cloud yang akan disediakan (IAAS, PAAS, SAAS) • Memilih teknologi cloud yang akan digunakan • Mensosialisasi adanya cloud lokal • Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Server • Evaluasi Kinerja dan Audit Log Server • Penyediaan fasilitas backup server dengan auto-backup realtime dan co-location • Penyediaan File Server dengan NAS (Network Attached Storage) untuk OPD

Program 14.1. Pembentukan Portal Data Kabupaten Tanggamus

Kode Program	14.1
Nama Program	Pembentukan Portal Data Kabupaten Tanggamus
	Membangun Metadata Statistik Sektoral
Inisiatif Strategis	Pembangunan Portal Data Daerah
Tahun	2024-2029
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bappelbangda
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan sumber data • Menentukan Struktur data • Menentukan metadata • Menerapkan Data Security • Membangun Aplikasi Sistem Portal Data • Pembentukan proses manajemen data berbasis DMBOK (Data Mangement Body of Knowledge) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data • Penyusunan SPM/SLA dan SOP Layanan Pengelolaan Data • Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Data untuk OPD • Implementasi sistem Manajemen Backup Data secara terpusat • Melakukan integrasi dan interoperability dengan portal data Pemerintah Daerah dan Pusat

Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Data yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya (pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman Manajemen Data yang berlaku) • Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari PERMENPPN 16/2020. • Bukti output kegiatan pengendalian manajemen data sesuai pedoman Manajemen Data dimana pelaksanaannya sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data • Bukti penetapan formal (Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE Instansi) atas kebijakan Manajemen Data yang diberlakukan kepada seluruh unit kerja. • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen data • Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data • Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Data
-----------------------------------	--

Program 15.1. Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk Menjamin Kerahasiaan, Keutuhan, Ketersediaan, Keaslian, dan Kenirsangkalan (nonrepudiation) Sumber Daya Terkait Data Dan Informasi

Kode Program	15.1
Nama Program	Penggunaan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah

Tahun	2024-2029
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan Defense In Depth • Menerapkan teknologi perimeter (Firewall, IDS, IPS) • Menerapkan QoS (Quality of Service) untuk pengaturan bandwidth • Menerapkan Update Patch secara regular pada PC dan Server • Menerapkan Enkripsi Data • Menerapkan Secure Programming untuk aplikasi • Melakukan Pentest secara berkala • Penyusunan SOP Pengembangan dan Pengujian Sistem Informasi yang aman • Peningkatan kompetensi SDM TIK tentang Secure Programming • Penerapan sistem SIEM (Security Information and Event Management) • Penambahan IDS (Intrusion Detection System) / IPS (Intrusion Prevention System) • Penerapan Honeynet dan DMZ (Demilitarized Zone) • Pengadaan perangkat lunak open source atau yang berlisensi

Program 15.2. Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat

Kode Program	15.2
Nama Program	Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
Tahun	2024-2029
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat Kebijakan Penerapan Keamanan Informasi • Melakukan sosialisasi kebijakan • Menurunkan kebijakan dalam SOP harian • Monitor dan Evaluasi SOP • Memasukan SOP sebagai penilaian kinerja • Sosialisasi dan peningkatan kesadaran bagi seluruh OPD tentang keamanan informasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kebijakan tentang penerapan keamanan informasi yang sudah disahkan • Notulensi rapat • Dokumentasi kegiatan • Dokumen SOP yang sudah disahkan •

Program 16.1. Penerapan penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Tanggamus

Kode Program	16.1
Nama Program	Penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Tanggamus
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Inisiatif Strategis	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
Tahun	2025-2029
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan Kompetensi SDM yang memahami big data • Menentukan Business Case Pemda untuk disolusikan dengan data • Membangun sistem big data infrastruktur dan aplikasi) • Menentukan sumber data pemda (dokumen, video, database, social media, audio) • Melakukan Ekstrasi Data • Memastikan kualitas data dengan metode cleansing dan filtering • Mengintegrasikan data untuk masuk ke dalam sistem big data

Program 16.2. Penerapan Machine Learning untuk analisa data menuju kecerdasan buatan

Kode Program	16.2
Nama Program	Penerapan Machine Learning untuk analisa data menuju kecerdasan buatan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Inisiatif Strategis	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
Tahun	2025-2029
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan Kompetensi SDM yang memahami big data dan machine learning • Membangun sistem big data secara infrastruktur • Membangun sistem data analytic berbasis machine learning, dengan pilihan teknologi dan vendor yang sesuai kebutuhan • Menampilkan data analytic dalam sebuah command center • Memberikan pemahaman kepada pimpinan untuk menggunakan data untuk mengambil keputusan

Program 17.1. Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE

Kode Program	17.1
Nama Program	Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Inisiatif Strategis	Promosi Literasi SPBE
Tahun	2024-2029

Penanggungjawab	BKPP dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Memilih lembaga pelatihan yang kompeten (LSP BNSP)• Menyusun topik materi sosialisasi SPBE• Menyusun metode sosialisasi yang berkesinambungan• Melakukan sosialisasi• Melakukan evaluasi

Program 18.1. Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE

Kode Program	18.1
Nama Program	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
Tahun	2024-2024
Penanggungjawab	BKPP dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">▪ Menentukan dan menambah jumlah formasi jabatan fungsional▪ Melakukan penerimaan pegawai yang sesuai

Program 18.2. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE

Kode Program	18.2
Nama Program	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
Tahun	2024-2029
Penanggungjawab	BKPP dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengambil referensi dari standar kompetensi SDM yang ada ▪ Kerjasama dengan akademisi melalui PKL dan Internship ▪ Memilih lembaga pelatihan dengan label LSP (lembaga sertifikasi profesi BNSP) ▪ Menentukan pelatihan yang sesuai untuk ASN penyelenggara SPBE <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan SDM Tata Kelola SPBE (Business Analyst, IT Service Manager, Enterprise Architect, GCIO) - Pelatihan SDM Infrastruktur TIK (Data Center Specialist, Cloud Specialist, Network Specialist, System Administrator, Technical Specialist, Operation Center Specialist) - Pelatihan SDM Pengembangan Aplikasi (Web Developer, system Analyst, Database Administrator) - Pelatihan SDM Big Data (Big Data Specialist, Data Specialist, Data Science, Machine Learning) - Pelatihan SDM Literasi Digital (Digital Skill) untuk seluruh ASN ▪ Menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan perencanaan ▪ Melakukan uji sertifikasi nasional

Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none">▪ Dokumentasi kegiatan pelatihan/sertifikasi dari rencana peningkatan kompetensi, atau adanya hasil penilaian evaluasi kinerja ASN (salah satunya skill) oleh unit pengelola SDM ASN (misal: BKPSDM).▪ Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kinerja/kompetensi SDM TIK
---	--

Program 19.1. Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE

Kode Program	19.1
Nama Program	Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
Inisiatif Strategis	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan non pemerintah
Tahun	2024-2029
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan definisi dan ruang lingkup kolaborasi ▪ Penyusunan kebijakan kolaborasi ▪ Menentukan komponen Forum (Universitas, Komunitas, Wakil masyarakat, ASN /OPD, Pelaku Usaha) ▪ Menentukan Agenda dan Topik dalam setiap diskusi dengan tujuan tertentu ▪ Membahas isu isu strategis terhadap perkembangan SPBE dalam output pada layanan public terpadu dan layanan Adpem terpadu ▪ Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikutnya sebagai tindak lanjut ▪ Pembuatan SOP Kolaborasi SPBE antar unit kerja, Pembuatan Laporan Kegiatan kolaborasi antar unit kerja, Pembuatan laporan penggunaan kolaborasi tiap unit kerja ▪ Penyelenggaraan kegiatan koordinasi Tim Koordinasi SPBE dengan seluruh perwakilan unit kerja. ▪ Review dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE ▪ Penyusunan revisi penyempurnaan penerapan kolaborasi antar unit kerja Tim Koordinasi SPBE berdasarkan hasil review.

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Notulensi/catatan/laporan hasil rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE
- Bukti undangan rapat rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE
- Dokumentasi aktivitas kolaborasi penerapan SPBE antar unit kerja sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Instansi dan/atau dilengkapi bukti-bukti undangan rapat notulensi/catatan/laporan kolaborasi penerapan SPBE

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Tanggamus tahun 2024 – 2029 memuat analisis kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi, infrastruktur, dan kondisi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Kabupaten Tanggamus sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

Target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kabupaten Tanggamus, serta diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis. Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kabupaten Tanggamus meliputi tahapan pembangunan fondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE.

Pembangunan SPBE di Kabupaten Tanggamus meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia. Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk roadmap yang memetakan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Tanggamus ini bukan dokumen yang statis, namun merupakan dokumen hidup dan fleksibel. Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Tanggamus harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Pada akhirnya, dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Tanggamus dapat menjadi acuan dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tanggamus selama 5 (lima) tahun ke depan demi mewujudkan good governance di Kabupaten Tanggamus yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.